

## **DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA TAHUN 2014-2020**

Dewi Suratningsih<sup>1\*</sup>, Dea Puspita<sup>2</sup>, Safira<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia  
Surel: dewi.suratiningsih@fisip.untan.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari melihat konflik berkepanjangan Palestina – Israel sekaligus ingin mengetahui peran diplomasi pemerintah Indonesia dan juga NGO di Indonesia yang bergerak aktif dalam bidang kemanusiaan. Upaya diplomasi dapat di lihat dari aktifnya Indonesia dalam mengirimkan bantuan yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah saja namun banyak dari masyarakat Indonesia yang bahkan tergerak untuk meringankan beban masyarakat Palestina. Hal inilah yang akhirnya mendorong banyak NGO lahir untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan oleh masyarakat akan tersampaikan dengan baik. Keberadaan NGO ini pun tak hanya sebagai perpanjangan tangan masyarakat tetapi juga sebagai wadah perjuangan untuk rakyat Palestina. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori multi-track diplomacy untuk melihat aktivitas yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan NGO dalam diplomasi kemanusiaan dalam isu Palestina. Tulisan ini beragumen bahwa antara pemerintah Indonesia dan NGO memiliki peran yang bersinergi satu sama lain. Kedua aktor ini dapat dikatakan berada pada jalur diplomasi yang sama sehingga dapat berkolaborasi dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina.

**Kata Kunci:** Diplomasi Perdamaian; Diplomasi Kemanusiaan; NGO; Multi-Track Diplomacy, Krisis Kemanusiaan

Diajukan: 10 Mei 2020

Direvisi: 20 Juni 2020

Diterima: 30 Juni 2020

**Sitasi:** Suratningsih, D. et al. (2020). Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25 (1), 11-28.

## Pendahuluan

Palestina merupakan wilayah diperebutkan sejak berabad-abad yang lalu. Namun, dalam dunia internasional awal mula terjadinya konflik Palestina – Israel diawali sejak adanya Deklarasi Balfour. Deklarasi ini lahir setelah Inggris menguasai sebagian wilayah bekas Kekaisaran Ottoman yang runtuh. Deklarasi Balfour menyatakan bahwa Inggris memberikan dukungan kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina atau yang mereka sebut sebagai *National Home* pada tanggal 2 November 1917 (Fakhrudin dan Nurjannah, 2019). Hal itu menyebabkan Israel berhasil mendirikan negaranya pada tahun 1948 di wilayah yang dulu merupakan milik Palestina

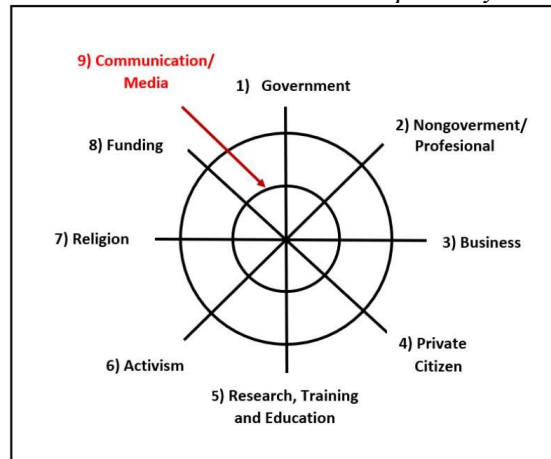
Pendudukan Israel di wilayah Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dikarenakan upaya Israel dalam memperluas pemukiman masih terjadi dengan menggusur wilayah Palestina terutama di Tepi Barat. Konflik ini tentu saja mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia yang *aware* dengan masalah krisis kemanusiaan, salah satunya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia merasa berhak dan berkewajiban memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Namun, tidak hanya karena kesamaan identitas agama semata, Indonesia juga memiliki ‘hutang’ moral sebagai negara yang di akui kemerdekaannya pertama kali oleh Palestina.

Melihat konflik Palestina-Israel, Indonesia telah mengambil peranan sejak era pemerintahan presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Indonesia telah konsisten dalam menyuarakan dan mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya. Hingga sekarang pun pemerintah Indonesia masih terus aktif dalam mengikuti perkembangan konflik Palestina-Israel. Tidak hanya aktif mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Palestina, Indonesia juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Palestina serta aktif dalam mengangkat permasalahan konflik Palestina-Israel dalam forum Internasional.

Dalam membantu rakyat Palestina pemerintah tidak hanya berdiri sendiri, namun banyak juga banyak lembaga sosial kemanusiaan yang turut menjadi aktor agar dapat mempermudah setiap penyaluran bantuan ke Palestina. Melihat peran Lembaga sosial kemanusiaan yang begitu besar dalam isu Palestina, hal ini tentu saja berimplikasi pada meningkatnya citra Indonesia di lingkungan internasional. Sehingga antara Lembaga sosial kemasyarakatan Indonesia dan pemerintah Indonesia saling bersinergi satu sama lain.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori *Multi-track diplomacy* yang merupakan sebuah konsep diplomasi yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald dalam bukunya berjudul *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace* yang diterbitkan pada tahun 1996.

Gambar 1. *Multi-Track Diplomacy*



Sumber : *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*

*Track 1: Government*

Peran pemerintah dalam menciptakan perdamaian melalui langkah diplomasi masih terletak paling sentral. Dalam menciptakan perdamaian, pemerintah di dunia tetap melalui diplomasi secara resmi, pembuatan kebijakan, dan membangun perdamaian melalui aspek formal yang terdapat dalam proses pemerintahan seperti: eksekutif, kementerian, kedutaan besar, dan lain-lain.

*Track 2: Non Government/Professional*

Pada *track* kedua ini, aktor yang terlibat merupakan para profesional yang berasal dari non-pemerintah. Para profesional ini melakukan upaya analisis, pencegahan, penyelesaian, dan mengelola konflik-konflik internasional.

*Track 3: Business*

*Track* ketiga merupakan aktivitas bisnis. Dalam aktivitas bisnis selalu hanya untuk kepentingan ekonomi semata tetapi memiliki peran dalam menciptakan dalam menciptakan perdamaian. Aktivitas bisnis memiliki pengaruh dalam proses membangun perdamaian melalui penyediaan peluang-peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, jaringan komunikasi informal, dan dukungan terhadap aktivitas pembangunan perdamaian.

*Track 4: Private Citizen*

Pada *track* 4, warga Negara berperan secara individu dapat peran melalui berbagai ranah dan aktivitas perdamaian dan pembangunan melalui diplomasi warga negara, program pertukaran pemuda/pelajar, organisasi kerelawanan, organisasi non-pemerintah, dan kelompok kepentingan khusus.

#### *Track 5: Research, Educating, Training*

Pada track kelima ini mencakup tiga bidang yakni pertama, penelitian yang berhubungan dengan program universitas, wadah pemikir (think tanks), dan pusat penelitian khusus. Kedua, Program pelatihan yang menyediakan pelatihan kepada dalam keahlian-keahlian khusus dalam proses perdamaian seperti negosiasi, mediasi, dan resolusi konflik. Ketiga, pendidikan, termasuk pada taman kanak-kanak hingga program doktoral. Program pendidikan meliputi berbagai aspek global atau studi lintas budaya, studi perdamaian dan sistem dunia, dan analisis, manajemen, dan resolusi konflik.

#### *Track 6: Peace Activism*

Aktivis dalam track keenam meliputi bidang perdamaian dan lingkungan pada beberapa isu seperti perlucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kelompok kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan khusus pemerintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaan aktivis ini berfungsi mengawasi segala kebijakan pemerintah berkuasa.

#### *Track 7: Religion*

*Track* ketujuh membahas mengenai aspek religi atau kepercayaan. Dalam track ini menjelaskan peran komunitas keagamaan yang berorientasi pada aktivitas perdamaian dan pergerakan yang didasarkan pada moralitas seperti keadilan dan anti-kekerasan. Keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian karena nilai-nilai penting perdamaian terdapat pada nilai-nilai agama yang apabila mampu diterapkan oleh setiap manusia maka proses peacemaking akan dapat terwujud.

#### *Track 8: Funding*

Pada track kedelapan adalah Pendanaan yang mengacu pada komunitas pendanaan. Komunitas pendanaan ini dapat berupa lembaga/individual filantropi yang menyediakan bantuan finansial untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh track lain.

#### *Track 9: Media and Public Opinion*

Pada track terakhir mengacu pada peran media massa yang yang menggambarkan suara publik seperti bagaimana opini publik dalam dibentuk dan diekspresikan oleh media baik media cetak, film, video, radio, media elektronik dan seni. Media memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan isu-isu konflik, perdamaian dan resolusi konflik. Dengan begitu, informasi akan lebih cepat menyebar dan menggerakkan elemen-elemen masyarakat hingga kerjasama internasional dalam menciptakan perdamaian.

Maka dari itu, melihat berbagai permasalahan yang ada di Palestina, pemberian bantuan oleh NGO kemanusiaan telah memberikan peran dalam diplomasi kemanusiaan. Peran NGO dalam diplomasi kemanusiaan secara langsung mendukung diplomasi perdamaian yang di inisiasi oleh Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

## Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman secara umum setelah melakukan analisis terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian dan setelah itu menarik sebuah kesimpulan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam melakukan pengumpulan data dari penelitian lapangan, peneliti melakukan tiga langkah kegiatan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara terbagi menjadi dua, pertama melakukan wawancara (interview) dan kedua melakukan wawancara secara lebih mendalam. Peneliti dalam melakukan wawancara secara lebih mendalam dengan mewawancarai Pimpinan ACT (Aksi Cepat Tanggap) sebagai salah satu NGO kemanusiaan di Indonesia dan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Selain melakukan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan untuk melengkapi data dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal dan artikel yang terpercaya. Peneliti akan menelaah hasil penelitian terlebih dahulu dari artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peran Lembaga social kemanusiaan dan Pemerintah Indonesia dalam melihat isu kemanusiaan di Palestina.

Dalam melakukan analisis data dengan melakukan beberapa tahap seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2008, h. 337-347) yaitu dengan melakukan data *reduction*, data *analysis* dan *conclusion drawing/verification*. Dalam mengidentifikasi pembahasan tentang diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Indonesia dalam konflik Palestina-Israel, peneliti menggunakan beberapa tahap seperti *data reduction*, data *analysis* dan *conclusion drawing/verification*. Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap data *reduction* peneliti melakukan ringkasan dari data yang dikumpulkan, kemudian peneliti memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting terutama menyangkut peran pemerintah Indonesia dan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam konflik Palestina-Israel. Tujuan pada tahap data *reduction* adalah untuk memilah mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan.

Tahap yang kedua, dengan melakukan data *analysis* dimana menurut Miles dan Huberman (2008) tahap ini dinyatakan dengan memahami *narrative text* yang diperoleh dari hasil transkrip wawancara. Dalam memudahkan melakukan tahap ini maka peneliti melakukan pengelompokan data dan juga membuat pemisahan berdasarkan kategori dari data yang diperoleh.

Tahap yang ketiga, peneliti melakukan *conclusion drawing/verification*. Dalam melakukan *conclusion drawing/verification* peneliti mencoba untuk melakukan pengujian terhadap kesimpulan sementara dari analisis data untuk kemudian mencocokkan validitas dengan bukti berupa data/hasil pengamatan yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

## Hasil dan Diskusi

### Diplomasi Perdamaian Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Isu Palestina

Indonesia melalui politik luar negerinya lebih menekankan kepada diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat membuktikan kepada negara lain, bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang dapat menciptakan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dilihat dari hal-hal yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dalam merespon setiap permasalahan kemanusiaan yang terjadi serta menjadi mediator untuk negara-negara yang berkonflik membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dimulai pada 1 Januari 2019. (Kemlu, 2019)

Negara Indonesia sudah empat kali terpilih dan menempati posisi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020. Dalam terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB ada 144 dari 190 negara yang hadir untuk memilih dan memberikan kepercayaan bahwa, Indonesia bisa membangun jembatan perdamaian serta memajukan perdamaian dunia menggunakan cara-cara yang diplomatis. Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia menetapkan beberapa isu yang menjadi fokus penting untuk di bahas dalam forum PBB. Isu Palestina merupakan salah satu isu yang diangkat oleh Indonesia yakni mencoba memajukan dan menjembatani perdamaian dan memprioritaskan kemerdekaan Palestina. (BBC, 2018)

Indonesia merupakan negara yang selalu berpegang teguh untuk menjadikan Palestina sebagai prioritas utama dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu sesuai dengan amanah konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 yakni menghapuskan penjajahan yang ada di dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk itu upaya Indonesia dipusatkan pada upaya memastikan bahwa Dewan Keamanan PBB tetap memberikan perhatian pada pentingnya penyelesaian isu Palestina (*remains seized of the matter*) dan memperkuat kontribusi Indonesia bagi peningkatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan Palestina, baik secara bilateral ataupun melalui kerangka tripartite (Mardani, 2019).

Kemudian beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya mendorong penyelesaian isu Palestina antara lain sebagai berikut (Madanie, 2019):

*Pertama*, Indonesia berupaya untuk mendorong penyelesaian isu konflik antara Palestina dan Israel. Salah satunya, dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada 22 Januari 2019. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menyuarakan agar isu Palestina menjadi perhatian utama Dewan Keamanan PBB serta menekankan pentingnya tiga hal dalam menyelesaikan isu Palestina antara lain; (a) memberikan penghormatan terhadap Hukum Internasional dan Resolusi PBB, (b) proses perdamaian yang memiliki legitimasi internasional, (c) penghentian tragedi kemanusiaan di Palestina yang dilakukan oleh Israel.

*Kedua*, Indonesia bersama Kuwait memprakarsai Pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas pentingnya kelanjutan perlindungan internasional terhadap rakyat Palestina di Hebron, pada 6 Februari 2019.

*Ketiga*, pada 5 Maret 2019, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan kunjungan ke Amman dan Yordania dalam beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat Palestina yaitu, dalam rangka untuk membuka secara resmi rangkaian kegiatan pelatihan dalam bentuk bantuan peningkatan kapasitas bagi masyarakat Palestina di bidang kewirausahaan perempuan yang berada di kamp pengungsi, manajemen kebijakan fiskal, dan pengadaan barang oleh pemerintah.

*Keempat*, dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada 26 Maret 2019 dan 29 April 2019. Indonesia berusaha menyerukan tentang Solusi Dua Negara (yang memberikan kemerdekaan penuh bagi Negara Palestina selain eksistensi Israel) merupakan satu-satunya opsi bagi proses perdamaian Palestina dan Israel. Serta Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB agar bertindak nyata dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk kekerasan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang banyak menimbulkan korban jiwa.

*Kelima*, dalam pertemuan UN Forum on the *Questions of Palestine*, yang diadakan pada 4 April 2019, dan UN *Arria Formula Meeting on Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace*, pada 9 Mei 2019 yang di prakarsai oleh Indonesia, Kuwait, dan Afrika Selatan. Indonesia selalu membela Palestina dan terus mengecam, serta menentang perluasan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Hal yang dilakukan oleh Israel merupakan bentuk eksasi, yang bertentangan dengan hukum atau resolusi internasional, serta mengancam proses perdamaian Palestina dan Israel.

*Keenam*, pada 22 Mei 2019, saat memimpin sidang (*Briefing*) Dewan Keamanan PBB dalam membahas mengenai isu Palestina, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan tiga hal utama yang harus dilakukan masyarakat internasional terkait dengan proses perdamaian di Timur Tengah yaitu, berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil Palestina. Kedua melakukan upaya konkrit dalam mengatasi situasi kemanusiaan yang ada di Palestina karena akibat dari hal yang dilakukan Israel membuat banyak korban jiwa dan kesengsaraan bagi masyarakat Palestina. Terakhir memastikan kelanjutan proses perdamaian di Timur Tengah.

*Ketujuh*, berkenaan dengan situasi terakhir yang dihadapi Palestina, khususnya berkaitan dengan rencana AS untuk mengumumkan inisiatif perdamaian tanpa melalui proses konsultasi dengan pihak Palestina. Merespon hal tersebut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa, sebuah rencana perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menghadirkan perdamaian yang lestari paling tidak harus memiliki beberapa elemen sebagai berikut yaitu, inklusif (melibatkan kedua pihak yang bertikai Palestina dan Israel), komprehensif (tetap mementingkan solusi politik selain tawaran insentif ekonomi), dan tidak mengabaikan internationally agreed parameters.

*Kedelapan*, Indonesia melalui surat balasan kepada Presiden Palestina tertanggal 27 Mei 2019. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina dalam mempertahankan hak-haknya, serta mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip solusi dua negara dengan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

*Kesembilan*, Indonesia selalu menyuarkan posisi sebagai pendukung kemerdekaan Palestina dan selalu memprioritaskan Palestina secara konsisten pada berbagai pertemuan internasional, maupun pada forum-forum yang diadakan oleh PBB. Termasuk mendorong pentingnya persatuan sikap negara-negara anggota OKI dalam mendukung Palestina.

### **Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kepada Palestina**

Dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia mempunyai beberapa elemen penting salah satunya Diplomasi Kemanusiaan, maka dari adanya hal tersebut perlu untuk terus dilaksanakan serta di kembangkan dengan mengedepankan *added values*. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dilakukan dengan mengedepankan sejumlah prinsip dasar, yaitu: (1) prinsip perlindungan HAM bagi masyarakat yang terkena krisis; (2) prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam pemberian bantuan; (3) prinsip bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terkena dampak; serta (4) penghormatan terhadap integritas nasional dan kedaulatan negara yang menghadapi krisis. Melalui pendekatan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun '*trust*' dari negara dan masyarakat penerima bantuan dari Indonesia. Selanjutnya diharapkan dengan adanya bantuan kemanusiaan Indonesia dapat berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di negara yang terkena dampak krisis dan bencana (Kemlu, 2019).

Diplomasi Kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap Palestina dilakukan dengan memberikan beberapa bantuan berupa materi maupun jasa. Bantuan dari segi materi Indonesia memberikan beberapa hal sebagai berikut: pertama, Indonesia memberikan bantuan "In Kind" yang merupakan bantuan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.252 masyarakat Palestina. Kedua, Indonesia juga memiliki komitmen untuk memberikan bantuan pelatihansenilai USD 1,5 juta kepada masyarakat Palestina diberbagai bidang seperti pariwisata, teknologi, infrastruktur, informasi, pertanian dan light manufacturing. Selain memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan, Indonesia juga memberikan bantuan dalam hal dana, seperti memberikan bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk membangun Cardiac Center di rumah sakit As-Shifa di Gaza (Kemlu, 2019).

Selain itu bantuan Kemanusiaan Indonesia juga diberikan kepada Pengungsi Palestina melalui UNRWA dalam bentuk dukungan pendanaan sejak tahun 2009-2014 Pemerintah Indonesia telah mengkontribusikan sebesar USD 360.000. Pada tahun 2018, kontribusi rutin Indonesia ditingkatkan menjadi USD 100.000 setiap tahunnya. Pada tahun 2019, masih menanggapi tentang krisis kemanusiaan berkepanjangan yang harus dihadapi masyarakat Palestina, terutama pengungsi Palestina. Pemerintah Indonesia memberikan komitmen dukungan pendanaan, terutama bagi penyediaan pangan dan dukungan fasilitas kesehatan melalui UNRWA dengan nilai sebesar USD 1 juta (Kemlu, 2019).

Dari adanya bantuan dana dan pelatihan, serta kolaborasi antara Pemerintah dan non-pemerintah (akademisi, penggiat kemanusiaan, filantropis, dan faith and charity-based organizations) menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas Diplomasi Kemanusiaan Indonesia. Besarnya kebutuhan pendanaan Diplomasi Kemanusiaan seringkali dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah. Di sisi lain,



aktor kemanusiaan non-pemerintah meskipun memiliki jaringan yang luas dan *crowd funding* yang besar, sering kali menghadapi kendala dalam akses pendistribusian bantuan karena tidak melibatkan peran Pemerintah (Kemlu, 2019).

### **Diplomasi Kemanusiaan oleh NGO Kemanusiaan dalam Isu Palestina**

Peran NGO Kemanusiaan di Indonesia sangat besar dalam memberikan informasi dan menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina. Beberapa Lembaga Sosial Kemanusiaan tersebut antara lain :

#### **1. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)**

*Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) merupakan Lembaga Sosial Kemanusiaan yang bergerak dibidang medis dan kemanusiaan dibentuk pada 1999. MER-C dibentuk berdasarkan asas Islam dengan berpegang pada prinsip *rahmatan lil'aalamiin*. Prinsip *rahmatan lil'aalamiin* dapat diartikan sebagai bentuk gerak MER-C dalam memberikan rahmat melalui bentuk pertolongan atas dasar *urgency* kepada semua makhluk hidup tanpa melihat latar belakang. MER-C dibentuk dengan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan medis kepada korban perang, korban kekerasan akibat konflik, kerusakan maupun bencana alam yang ada di dalam maupun luar negeri (MER-C, 2018).

Adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina membuat MER-C memberikan beberapa bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina dengan mendirikan Rumah Sakit seluas 10.000 m<sup>2</sup> di Gaza, kemudian menyuarakan penghentian kebrutalan Israel dalam melakukan penghancuran rumah-rumah warga Palestina kepada PBB, MER-C juga mengadakan program bantuan Ramadhan dengan menyalurkan 1.000 paket sembako dan 1.000 paket bantuan berbuka puasa, serta menyalurkan bantuan hewan kurban yang terdiri dari 31 ekor domba ditambah satu ekor sapi dan satu ekor unta kepada masyarakat Palestina (MER-C, 2020).

#### **2. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)**

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dibentuk pada 8 Juni 2002, yang bergerak dibidang kemanusiaan dengan memberikan bantuan berupa dukungan, kesehatan, pertolongan kemanusiaan dan sosial. BSMI juga berperan aktif dalam menghadapi dan menanggulangi krisis kemanusiaan di negara-negara yang berkonflik tanpa memandang ras, agama, negara maupun aspirasi politik (BSMI, 2020).

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina membuat BSMI memberikan beberapa bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina seperti memasok bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1.710 liter ke Rumah Sakit Shifa yang ada di Gaza untuk mengatasi krisis listrik, kemudian BSMI juga mendistribusikan daging hewan kurban ke Gaza, menyediakan tangka air dan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Palestina, serta BSMI menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat Palestina seperti berupa makanan pokok dan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh pengungsi salah satunya berupa kursi roda (BSMI, 2020).

### **3. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)**

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dibentuk pada 10 Desember 1999, PKPU bergerak di bidang kemanusiaan dengan berperan untuk memberikan kontribusi terhadap sebuah pemecahan permasalahan yang terjadi di masyarakat. PKPU juga hadir untuk merancang program solutif dalam menyebarkan kemandirian dan rasa berdaya supaya masyarakat mampu menyelesaikan segala permasalahannya (Yunus, Mawardi dan Yoesoef, 2018).

Adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina membuat PKPU bergerak dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan masyarakat Palestina seperti memberikan bantuan sebesar 1 milyar dalam bentuk paket makanan kepada penduduk Gaza, memberikan bantuan obat-obatan dan memberikan bantuan air minum kepada masyarakat Palestina (Tribunnews, 2014).

### **4. Dompot Dhuafa (DD)**

Dompot Dhuafa (DD) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan berdasarkan 5 pilar program utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah, serta budaya. Pilar mengenai pendidikan Dompot Dhuafa berkomitmen menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya untuk kaum dhuafa. Kemudian pada pilar kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Pilar ekonomi Dompot Dhuafa memberdayakan masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat. Pilar sosial dan dakwah merespon cepat permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pilar yang terakhir mengenai budaya Dompot Dhuafa tidak akan melupakan budaya yang merupakan warisan leluhur zaman dulu yang mengandung nilai-nilai kebaikan (Dompot Dhuafa, 2019).

Dompot Dhuafa memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Palestina, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat Palestina akibat dari adanya krisis kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa berupa bantuan dana sebesar Rp 300 juta untuk kebutuhan makan masyarakat Palestina, Dompot Dhuafa juga mengirimkan relawan untuk pergi ke Gaza dalam membantu masyarakat Palestina yang ada disana, kemudian Dompot Dhuafa juga mendirikan Gaza Food Bank untuk 70 keluarga miskin dan anak yatim, serta menyalurkan sekitar 140 ekor kelinci setiap dua bulan (Dompot Dhuafa, 2019).

### **5. Komite Indonesia Solidaritas Palestina (KISPA)**

Komite Indonesia Solidaritas Palestina (KISPA) didirikan pada 14 Mei 2002, dimana KISPA didirikan sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat Indonesia atas terjadinya konflik Israel-Palestina yang terus berlarut-larut selama puluhan tahun. Adanya konflik tersebut membuat banyak kerugian yang harus diderita oleh rakyat Palestina, mulai dari tanah air mereka yang direbut oleh Israel, banyak masyarakat Palestina yang harus kehilangan nyawa maupun kehilangan materi. Dalam menjalankan aktivitasnya organisasi KISPA memiliki visi membangkitkan semangat

rakyat Indonesia untuk peduli terhadap perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan, khususnya dalam menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. KISPA terus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Palestina dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat Palestina. Bantuan yang diberikan KISPA antara lain yaitu: (Ishom Hainif, Ilham M, 2016).

- a) Relawan kemanusiaan KISPA pergi ke Gaza untuk memberikan bantuan dari rakyat Indonesia secara langsung kepada korban yang menderita, orang tua dan anak-anak Hafizh Yang telah mengikuti program menghafal Al-Qur'an selama dua bulan.
- b) KISPA memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan bantuan uang sebesar Rp. 600 juta dalam bentuk paket berbuka puasa dan paket makanan pokok berupa roti pada bulan Ramadhan yang akan diberikan kepada keluarga tidak mampu dan anak-anak yatim.
- c) KISPA juga memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak yatim dan para janda, serta janda syuhada Palestina yang gugur syahid.

#### **6. Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP)**

Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) didirikan sejak Mei 2006, dimana KNRP merupakan salah satu LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan yang peduli terhadap permasalahan masjid Al-Aqsa dan isu kemanusiaan yang ada di Palestina. KNRP telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan seni untuk menggalang dana dan opini untuk masyarakat Palestina (KNRP, 2020).

Adanya konflik yang terjadi antara Israel-Palestina membuat masyarakat Palestina harus mengalami krisis kemanusiaan. KNRP sebagai LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan terus memberikan beberapa bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan masyarakat Palestina. Bantuan yang diberikan oleh KNRP antara lain yaitu:

- a) KNRP bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Kampus Sekolah tinggi Islam SEBI untuk menggelar Konser Amal Penggalangan Dana untuk rakyat Palestina (KNRP, 2020).
- b) KNRP menjadi pendukung di acara Palestina *Solidarity Day* yang berhasil mengumpulkan Rp 750 juta untuk disumbangkan kepada masyarakat Palestina (KNRP, 2020).
- c) KNRP juga memberikan bantuan fasilitas berupa obat-obatan, memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan listrik, serta memberikan fasilitas air bersih (KNRP, 2020).

#### **7. Sahabat Al – Aqsa**

LSM Sahabat Al – Aqsa merupakan jaringan silaturahmi dari keluarga Indonesia yang sukarela membantu masyarakat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan. Menurut website resmi (Sahabat Al - Aqsa 2019) terdapat 3 fokus bidang kegiatan yang dilakukan oleh Sahabat Al – Aqsa, yaitu:

- a) Penyebarluasan informasi

Informasi ini dilakukan dengan menggunakan media sosial dan *website* resmi dari Sahabat Al – Aqsa sehingga setiap harinya terdapat berita *update* terpercaya dari *website* resmi Sahabat Al – Aqsa terutama terkait kondisi kemanusiaan yang sering kali dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Informasi terkait krisis kemanusiaan di Palestina ini juga diperoleh dari narasumber langsung di Palestina sebagai sumber utama atau tidak melalui perantara lagi.

b) Penerimaan amanah

Sahabat Al – Aqsa juga menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat Indonesia yang ingin mengumpulkan sumbangan dan bantuan. Dana yang diperoleh pun dari beberapa kegiatan amal, seperti pemutaran film, pameran foto, dialog dengan saudara-saudara di Palestina dan sebagainya yang kemudian di kumpulkan dan tidak disalurkan untuk saudara di Palestina.

c) Penyaluran langsung dana bantuan kemanusiaan

Hal ini dilakukan secara berkala oleh tim Sahabat Al – Aqsa dengan mengecek langsung penyaluran dana kepada saudara di Palestina. Selain itu, dana yang di kumpulkan memiliki sumber sendiri untuk operasional sehingga tidak semata-mata hanya dari sumbangan masyarakat.

## 8. Lazismu

Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya (Lazismu, 2019). Lembaga ini juga memberikan dana tersebut bukan hanya untuk kegiatan di dalam negeri tetapi juga bantuan bagi masyarakat internasional salah satunya untuk Palestina.

Bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh lazismu, yaitu berupa program “Dari Indonesia Untuk Palestina”. Program ini membuka saluran dana bagi setiap warga Indonesia yang ingin memberikan bantuan pada masyarakat Palestina. Penyaluran bantuan ini biasa melalui UNWRA (*The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees*) sebagai badan yang dipercaya PBB dalam melaksanakan bantuan darurat yang mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur kamp dan perbaikan termasuk di saat konflik bersenjata bagi Palestina (Lazismu, 2019).

## 9. Baitul Maal Hidayatullah

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional (Baitul Maal Hidayatullah 2018).

Dalam memberikan bantuan bagi masyarakat Palestina, BMH juga turut serta untuk itu, seperti kampanye bela Palestina. Hal ini dilakukan sebagai solidaritas BMH untuk

turut menyuarakan hak-hak kemerdekaan yang sudah seharusnya dimiliki bangsa Palestina (Baitul Maal Hidayatullah 2017).

#### **10. Aksi Cepat Tanggap (ACT)**

Sejak berdiri pada 21 April 2005, ACT secara resmi meluncurkan diri sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Dengan tujuan untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitas mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian berbagai program pemulihan pasca bencana, program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta adanya program yang berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

ACT juga memiliki program-program yang dikhususkan untuk merekonstruksi permasalahan yang menimpa rakyat Palestina. Berikut program-program yang dibuat ACT untuk membantu permasalahan kemanusiaan di Palestina, yaitu *Palestine Back to School*, Bahan Bakar Untuk Listrik, Dapur Umum Indonesia, Dapur Umum Rumah Sakit, Difable, *Humanity Card*, Kafalah Murabbitun Al-Aqsa, Kapal Kemanusiaan, Paket Pangan Ramadhan, *Water Tank* dan *Winter Aid*.

#### **11. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Baznas 2020). Namun selain mengatur zakat secara nasional, baznas juga memiliki beberapa program bagi masyarakat Palestina sebagai bentuk program internasional.

#### **12. Rumah Zakat**

Rumah Zakat adalah *World Digital Charity Organization* yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat (Rumah Zakat 2020). Selain itu, program rumah zakat juga memberikan manfaat bagi masyarakat internasional yang mengalami kesulitan dan musibah, salah satunya yang dialami oleh Palestina. Program ini bahkan menjadi program unggulan di rumah zakat dengan turut aktif dalam melihat perkembangan isu terkait krisis kemanusiaan di Palestina.

Seperti dalam menghadapi krisis pangan, rumah zakat menyalurkan bantuan pangan kepada penduduk Palestina. Bantuan ini diberikan kepada penyandang disabilitas, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit di kota Gaza, Palestina akibat krisis pangan yang melanda. Penyaluran untuk 1000 jiwa ini dilakukan di beberapa titik seperti Rafah, Khan Younis, Gaza Tengah dan Gaza Utara (Rzadmindevel 2020).

## **Diplomasi Jalur 1.5 antara Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan dalam Isu Kemanusiaan di Palestina**

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik dan akan mendukung sepenuhnya partisipasi maupun kontribusi dari pihak non-pemerintah di Indonesia. Dengan adanya berbagai Lembaga sosial yang dengan sigap terus membantu rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri akan terus memberikan dukungan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitasi terhadap hal-hal yang di perlukan bagi pelaksanaan misi kemanusiaan oleh masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina. Hal ini tentu dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan, termasuk keamanan perjalanan menuju wilayah Palestina yang sedang di landa konflik (Kemlu, 2019).

Berkembangnya NGO kemanusiaan juga menjadi media bagi terwujudnya diplomasi kemanusiaan seperti yang di diharapkan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sehingga Pemerintah RI sangat mengapresiasi kontribusi dari lembaga sosial kemanusiaan dalam membantu rakyat Palestina. Kontribusi suatu Lembaga dapat menjadi pelengkap dalam mencapai upaya, peran, dan kontribusi yang telah dilakukan Pemerintah RI di forum Internasional seperti di PBB, KAA, GNB, OKI dan lain-lain. Kontribusi NGO juga mencerminkan sinergi dukungan dari pemerintah dan rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Dari hal ini, maka dapat di katakan bahwa peran Pemerintah RI dan NGO harus tetap berjalan satu arah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Pemerintah sudah sangat menekankan perhatian pada Palestina, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi penggerak masyarakat dan menyuarakan aksi nyata dengan mengirimkan bantuan.

Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatannya, NGO di Indonesia sudah menjadi bagian aktor *Multi-Track Diplomacy*, khususnya dalam *second track diplomacy* yaitu sebagai aktor non negara yang aktif dalam membangun citra positif Indonesia khususnya dalam hal penggalangan dana dan penyaluran sumbangan di bidang kemanusiaan. Sebagaimana disuarakan dalam berbagai forum internasional yang relevan, termasuk dalam Pertemuan Tingkat Tinggi OKI, Pemerintah RI yang mendorong adanya penguatan pendekatan *second track diplomacy* dengan melihat *like-minded societies* dalam upaya membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya, Pemerintah RI saat ini mendorong peningkatan kolaborasi antar aktor negara dan non-negara yang di sebut sebagai *1.5 track diplomacy* khususnya dalam mengatasi isu kemanusiaan serta yang bersifat multi-dimensional (Kemlu, 2019).

Hal ini juga di bahas dalam pertemuan/platform pertama *Regional Conference on Humanitarian Assistance* yang di buka oleh wakil Menteri Luar Negeri di Jakarta, pada 8 Agustus 2019 dan diikuti oleh setidaknya 17 negara di kawasan, 5 Organisasi internasional dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan. Ada beberapa isu yang dibahas oleh para peserta konferensi, yakni : 1) Pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal, 2) Kerja sama dan kolaborasi *multi-sectoral* dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, 3) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal,

terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua, 4) Aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan; serta 5) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Dari kelima pembahasan tersebut tentunya bisa menjadi kabar baik bagi setiap NGO kemanusiaan, karena akan lebih mudah dalam menyuarakan dan membantu para korban bencana dan konflik (Kemlu, 2019).

Kemenlu melihat peran yang dilakukan oleh NGO kemanusiaan terhadap isu Palestina akan kembali lagi pada sinergisitas yang akan dibangun oleh para pemangku kepentingan baik aktor negara maupun aktor non-negara yang posisinya sama penting. Hal ini dikarenakan kerumitan dalam penyelesaian isu Palestina yang memerlukan pendekatan multidimensional.

Kesulitan bekerja sama dengan Israel juga dialami oleh PBB sendiri. Salah satunya terjadi pada Pelapor Khusus PBB dari Indonesia, Makarim Wibisono pada tahun 2014. Beliau menjadi Pelapor Khusus PBB sejak 2014 sampai dengan 2016. Dalam bukunya yang berjudul “Diplomasi Untuk Palestina: Catatan Pelapor Khusus PBB” menceritakan dengan jelas bagaimana sulitnya menjadi Pelapor Khusus yang memiliki mandat langsung dari PBB. Kesulitan ini dihadapi karena Israel yang terus menghalang-halangi proses atas kerja dari Pelapor Khusus untuk melihat secara langsung kawasan Palestina dan tindakan yang melanggar HAM lainnya yang dilakukan Palestina (Wibisono, 2017).

Dari hal inilah perlu dipertimbangkan lagi, karena banyaknya kepentingan dan kekuatan besar yang membelakangi konflik Palestina-Israel ini. Kepentingan itu tidak hanya dari aktor non-negara di Indonesia. Namun NGO juga dapat berperan lebih luas melalui jejaring dengan sesama aktor pemerintah di berbagai negara, misalnya dalam melakukan kampanye yang dapat memberi keadilan bagi bangsa Palestina yang masih berada di bawah pendudukan. Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanction* (BDS) sebagai contoh nyata dari jejaring yang dapat dimanfaatkan pula aktor-aktor non-negara dalam melakukan kampanye atau menggalang tekanan internasional dalam membantu perjuangan Palestina.

Sinergisitas yang dibangun Kemenlu juga dapat dilihat melalui perannya menjadi mediator penyediaan kepercayaan masyarakat, misalnya akhir tahun 2018 Menteri Luar Negeri Indonesia turut mempublikasikan bantuan yang disalurkan untuk Palestina dari Masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Lembaga seperti ACT, Dompet Dhuafa dan lain-lain. Publikasi ini dapat diartikan sebagai penghargaan terhadap kontribusi masyarakat Indonesia yang turut andil membantu rakyat Palestina serta menggambarkan bahwa NGO dan pemerintah dapat berkolaborasi bersama menyelesaikan krisis kemanusiaan di Palestina.

Kolaborasi dan sinergi yang erat antara Pemerintah dan berbagai LSM di Indonesia, terutama dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina, telah mendapat apresiasi dari pihak internasional, termasuk juga forum internasional seperti PBB yang menangani pengungsi Palestina, seperti UNRWA. UNRWA juga menilai bahwa kolaborasi dan sinergisitas yang kuat ini dapat menjadi gambaran bagi negara lain bahwa pentingnya saling kerjasama dengan satu tujuan, yaitu untuk mendorong perdamaian Palestina (Kemlu, 2019).

Dengan demikian, diplomasi jalur 1.5 antara pemerintahan Indonesia dan NGO rasanya perlu sekali untuk dibangun. Tidak hanya untuk memudahkan proses dalam memberikan bantuan, namun dampaknya lebih besar dari pada itu. Kepercayaan dari masyarakat dapat menjadi bukti kuat bahwa melalui NGO yang didukung pemerintah dapat menjadi pola yang baik dalam mencapai tujuan, misalnya untuk mencapai kemerdekaan Palestina dan pengembalian hak-hak rakyat Palestina.

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang hingga saat ini masih konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan memberikan donasi atas kebutuhan rakyat Palestina. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan NGO melalui jalur diplomasi 1.5 menggambarkan dukungan serius bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hak-hak rakyat Palestina yang terenggut perlu disuarakan dalam forum-forum internasional seperti OKI dan PBB walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak negara besar berada di belakang Israel. Diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia sebagai *Middle Power* yang terus berusaha aktif berkontribusi secara regional dan global.

### **Referensi**

- ACT. "Makna Pertemuan ACT dan Kemenlu RI", diakses melalui <https://news.act.id/berita/makna-pertemuan-act-dan-kemenlu-ri> pada 12 September 2019
- ACT. "Sejarah ACT", act.id, diakses dari <https://act.id/tentang/sejarah> pada 16 November 2019.
- Bbc.com. (2018). "Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia Akan Mewakili Suara Negara Muslim ?", diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44423370> pada 20 September 2019
- Baitul Maal Hidayatullah. (2017). "Cara BMH Dan HIPGABI Ikut Aksi Bela Palestina." *Bmh.or.Id*, February 26, 2017. <https://www.bmh.or.id/cara-bmh-dan-hipgabi-ikut-aksi-bela-palestina/>.———. 2018. "Profil Lembaga." *Bmh.or.Id*, February 26, 2018. <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>.
- Baznas. (2020). "Ini Harga Kurban Online Untuk Pengungsi Palestina." *Baznas.Go.Id*, February 26, 2020. [https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini\\_Harga\\_Kurban\\_Online\\_untuk\\_Pengungsi\\_Palestina/83](https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini_Harga_Kurban_Online_untuk_Pengungsi_Palestina/83).
- Baznas. (2020). "Tentang BAZNAS." *Baznas.Go.Id*, February 26, 2020. <https://baznas.go.id/profil>.
- BSMI. (2020). "Alasan Kenapa Ikut Bergabung dengan BSMI DKI Jakarta." *Bsmidki.or.Id*, 2020. <https://bsmidki.or.id/>
- BSMI. (2020). "Palestina, BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia." *Bsmi.or.Id*, 2020. <https://www.bsmi.or.id/program/palestina/2>



- Diamond, Louise & John McDonald. (1996). *Multi-Track Diplomacy : A Systems Approach to Peace*, Third Edition. USA : Kumarian Press.
- Dompot Dhuafa. (2019). "Dompot Dhuafa." *dompetdhuafa.Org*, 2019. <https://dompetdhuafa.org/>
- Dompot Dhuafa. (2019). "Dompot Dhuafa dan Berbagai Ormas Serukan Peduli Palestina." *dompetdhuafa.Org*, 2019. <https://zakat.or.id/dompot-dhuafa-dan-berbagai-ormas-serukan-peduli-palestina/>
- Fakhrudin, M & Nurjannah, EP. 2019. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina." *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1 No.: 15–26. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/download/10479/6705/>.
- Ishom Hainif, Ilham M. (2016). "Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina (Studi Gerakan Solidaritas Palestina Di Indonesia)." July, 2016. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpma1bfd160d32full.pdf>
- Kemlu.go.id. (2019). "Isu-Isu Kemanusiaan". [https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman\\_list\\_lainnya/isu-isu-kemanusiaan](https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan). diakses pada 11 September 2019
- Kemlu.go.id. (2019). "Isu Palestina", diakses melalui [https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman\\_list\\_lainnya/isu-palestina](https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina) pada 20 September 2019
- Kemlu.go.id. (2019). "Regional Conference on Humanitarian Assistance, Upaya Kongkrit Kepemimpinan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Kawasan", diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/511/berita/regional-conference-on-humanitarian-assistance-upaya-kongkrit-kepemimpinan-diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-kawasan>, pada 19 September 2019
- KNRP. (2020). "Komite Nasional Rakyat Palestina-KNRP-Komite Nasional Rakyat Palestina." *KNRP.Org*, 2020. <https://knrp.org/#:~:text=Komite%20Nasional%20untuk%20Rakyat%20Palestina,dana%20dan%20opini%20untuk%20Palestina>.
- KNRP. (2020). "Aktivitas-Komite Nasional Rakyat Palestina-KNRP". *KNRP.Org*, 2020. <https://knrp.org/aktivitas/>
- Kurmala, Azis. (2019). "Baznas Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina." <https://www.antaranews.com/>, February 26, 2019. <https://www.antaranews.com/berita/842640/baznas-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-pengungsi-palestina#mobile-src>.
- Lazismu. (2019). "Dari Indonesia Untuk Palestina." *Lazismu.Org*, February 26, 2019. <https://www.lazismu.org/blog/jakarta-2/post/dari-indonesia-untuk-palestina-939>.
- Lazismu. (2019). "LATAR BELAKANG: Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern." *Lazismu.Org*, February 26, 2019. <https://www.lazismu.org/latar-belakang>
- Madanie, Ainur Rifqie. (2019). Hasil Kuesioner : "Strategi Komunikasi dan Kampanye Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia – Palestina". Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 16 Agustus 2019
- MER-C. (2018). "Lembaga Medis dan Kemanusiaan." *Mer-c.Org*, 2018. <https://mer-c.org/>

- c.org/*
- MER-C. (2020). "Berita MER-C, Bencana Alam, Kemanusiaan." *Mer-c. Org*, September 29, 2020. <https://mer-c.org/berita/>
- Miles, M.B & Huberman. (2008). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mostashari, Ali. (2005). "An Introduction to Non-Governmental Organizations (NGO) Management." <http://web.mit.edu/isg/NGOManagement.pdf>.
- Mukhti, M.F., "Sukarno dan Palestina", diakses melalui <https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-palestina-Dw5OP>, pada 19 September 2019
- Putri, Martharia UT. (2014). "Role Of Non Government Organisation (Ngo) Dan Community Based Organisation (Cbo) Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi Pada LSM Damar Dan Ormas Aisyiyah Bandar Lampung)." *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* Vol. 1 No.: 21–27. <http://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Role-Of-Non-Governmen-Organisation-NGO-Dan-Community-Based-Organisation-CBO-Dalam-Penguatan-Pengarusutamaan-Gender.pdf>
- Rumah Zakat. (2020). "Tentang Rumah Zakat." *Rumahzakat.Org*, February 26, 2020. <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/?sfw=pass1614357086>.
- Rzadmindevel. (2020). "Hadapi Krisis Pangan, Rumah Zakat Action Salurkan Bantuan Sahabat Al - Aqsa. 2019. "Kegiatan." <Http://Sahabatalaqsha.Com/>, February 26, 2019. [http://sahabatalaqsha.com/nws/?page\\_id=2](http://sahabatalaqsha.com/nws/?page_id=2).
- Saragih, MH. (2018). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(2):136.
- Tribunnews. (2014). "PKPU Galang Dana untuk Masyarakat Palestina." Diakses dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2014/07/15/pkpu-galang-dana-untuk-masyarakat-palestina>
- Wibisono, Makarim. 2017. Diplomasi Untuk Paestina : Catatan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Depok : LP3ES, Anggota IKAPI
- Yunus, M, Mawardi dan Yoesoef, Anwar. (2018). "Perkembangan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh (2004-2016)". Diakses dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/sejarah/article/view/8508>.